

AKAR BANALITAS INTELEKTUAL (SUATU KAJIAN FILSAFAT ILMU)

Anastasia Jessica Adinda S.¹

Abstrak

Penelitian ini bertolak dari permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yang oleh Heru Nugroho dirumuskan dalam istilah 'banalitas intelektual'. Banalitas intelektual ialah situasi yang ditandai oleh pendangkalan pemikiran yang tidak disadari, kemerosotan kualitas intelektual dan akademik. Ide dasar dari penelitian ini ialah mencari akar banalitas intelektual di level filsafat ilmu karena praktek pendidikan mengandaikan adanya cara pandang terhadap ilmu.

Akar dari banalitas intelektual yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah pertama, adanya cara pandang mementingkan kuantitas untuk mengukur kualitas intelektual. Pengutamaan semangat mementingkan kuantitas ini dapat dilihat sebagai romantisme kejayaan metode induksi; kedua, pelupaan terhadap tujuan ilmu untuk mensejahterakan umat manusia, bukan hanya segolongan kecil manusia.

Kata kunci: banalitas intelektual, filsafat, ilmu.

Abstract

This research starts from the problems of education in Indonesia in which Heru Nugroho call them "intellectual banality". The intellectual banality is a situation which is characterized by unconscious superficiality of thought, and degradation of intellectual and academic quality. Basic idea of this research is to look for roots of the intellectual banality at the level of philosophy of science because educational practices presuppose a perspective to science.

Roots of the intellectual banality in this research are: first, there is a priority of quantitative perspective to measure intellectual quality. Prioritization of the quantitative perspective can be viewed as a romanticism of induction method triumph.; second, ignorance the aim of science which is create the humanitarian welfare in general, not only one or a small group of person.

Keywords: *intellectual banality, philosophy, science.*

A. Pendahuluan

Tulisan ini muncul dari refleksi penulis selama menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga strata dua, sungguh penulis ingin adanya perbaikan pada dunia pendidikan. Kritik dan otokritik dalam tulisan ini, jika ada, ialah lahir dari refleksi tersebut, bukan untuk memojokkan pihak tertentu. Kesadaran akan ketidakberesan yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi di Indonesia, mengawali pergulatan penelitian ini. Contoh dari ketidakberesan tersebut adalah dari mahasiswa yang banyak diam/tidak bertanya saat perkuliahan, mengutamakan kuantitas IPK tanpa banyak berpikir tentang kualitas, dosen yang banyak order di luar atau terlalu disibukkan dengan penelitian-penelitian pragmatis yang akhirnya hanya menumpuk di pojok perpustakaan. Selain itu para dosen disibukkan dengan peratur-

¹Staf pengajar di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
Email: anastasiajessica89@gmail.com.

an dari negara untuk bisa naik pangkat atau mendapat sertifikasi dosen hingga banyaknya pengangguran bergelar sarjana, serta mahalnya biaya pendidikan.

Penulis tentu tidak bisa menghindarkan diri untuk tidak melakukan masalah-masalah pendidikan tersebut sebab penulis juga menjadi bagian di dalam pusaran masalah. Penulis merangkum semua situasi ketidakberesan tersebut dengan istilah “banalitas intelektual”, meminjam istilah Heru Nugroho dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Sosiologi UGM tahun 2012.

Tulisan ini, sebagaimana Heru Nugroho juga menyatakan terhadap tulisan pidato pengukuhanya, adalah wajar jika dicurigai memiliki kepentingan kuasa di dalamnya, yakni sebagai bagian dari hasrat kuasa akademisi dalam produksi pengetahuan untuk menciptakan ketidakstabilan makna karena penolakan terhadap obyektivitas (Nugroho, 2012: 5). Tulisan ini juga sangat terbuka kemungkinannya untuk dicurigai sebagai bagian dari upaya pragmatis guna memenuhi persyaratan akademis. Semua kecurigaan itu, sekali lagi, wajar. Kesalingcurigaan di antara sudut pandang diharapkan akan berbuah sesuatu yang positif karena berakhir dengan itikad baik untuk terbuka, *open ended* (Nugroho, 2012: 5).

Banalitas mengingatkan kepada istilah Hannah Arendt yang ditulis dalam *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* untuk menyebut kejahatan yang telah kehilangan ciri jahatnya, dirasakan wajar/biasa saja. Banalitas kejahatan terjadi karena dangkalnya refleksi manusia terhadap situasi kejahatan yang terjadi. Pemikiran kritis menjadi lenyap. Subjek pelaku kejahatan tidak bisa mengimajinasikan jika berada dalam posisi korban (Haryatmoko, 2010: 51). Arendt mengungkapkan istilah “banalitas kejahatan” untuk mendeskripsikan situasi yang dialami Eichmann, prajurit Nazi. Eichmann tidak merasa melakukan kejahatan terhadap kaum Yahudi. Eichmann merasa hanya melakukan kewajiban di satuan militernya, bahkan ia menyarankan untuk mempertanyakan lagi aturan-aturan dasar di satuan militernya karena seharusnya dia naik pangkat setelah menunaikan tugas (Wattimena, 2011). Eichmann bukan orang yang bengis, kejam, jahat sebagaimana tokoh lawan dalam cerita-cerita superhero. Eichmann adalah orang biasa yang berpikir lurus dan justru karena kelurusaninya ia menjadi kehilangan daya kritis.

B. Tentang Banalitas Intelektual

Banalitas intelektual ialah suatu kondisi yang ditandai dengan tiga hal, yaitu pendangkalan pemikiran yang tidak disadari, merosotnya kualitas akademik, dan kualitas intelektual. Kualitas akademik

dapat dipahami sebagai kemampuan penguasaan ilmu, sedang kualitas intelektual ialah komitmen akademisi terhadap bidang ilmu yang digeluti. Heru Nugroho menyatakan,

“Secara sederhana banalitas intelektual di universitas ditandai dengan pendekatan yang tidak disadari disertai menurunnya kualitas akademik sekaligus merosotnya komitmen terhadap bidang ilmu yang digeluti oleh para akademisi. Kualitas akademik merujuk pada tingkat penguasaan ilmu yang menyediakan peralatan-peralatan kerja akademik sedang kualitas intelektual merujuk pada komitmen akademisi terhadap ilmu sebagai bidang pengabdian.” (Nugroho, 2012: 6).

Pemaparan berikut sebagai ilustrasi. Saya seorang dosen fakultas filsafat, merosotnya kualitas akademik ialah ketika saya tidak mampu menguasai teori-teori filsafat yang menyediakan pisau analisis untuk memahami realitas kekinian. Merosotnya kualitas intelektual adalah jika saya hanya mengadakan penelitian atau menulis jurnal semata-mata untuk memenuhi persyaratan akademis. Proses yang demikian berjalan seperti sewajarnya sebab dosen-dosen lain juga melakukannya hal itu, ditambah peraturan dari negara yang banyak memberi syarat administratif untuk kenaikan pangkat, yang memang harus diperlukan.

Pengertian intelektual disadari memiliki arti yang sangat luas. Pengertian intelektual yang dimaksudkan oleh Heru Nugroho dibatasi pada kegiatan intelektual kampus yang aktivitasnya berada di perguruan tinggi (Nugroho, 2012: 7). Banalitas intelektual dapat diketahui dari beberapa indikator berikut.

1. Pengkhianatan akademik

Indikator pertama ialah pengkhianatan akademik. Para akademisi lebih mementingkan nilai pragmatis daripada nilai-nilai ilmu pengetahuan. Akademisi yang seharusnya bertugas melakukan refleksi kritis atas nilai-nilai abstrak yang abadi, seperti kebenaran, keadilan, terjebak pada kepentingan-kepentingan pragmatis untuk meningkatkan pendapatan. Dicontohkan, seorang dosen yang memiliki pekerjaan lain di luar kota sehingga membuat tidak punya cukup waktu lagi beraktivitas di kampus. Contoh lain, keberpihakan akademisi ketika menjadi staf ahli, staf khusus, atau konsultan dari CSR (*Corporate Social Responsibility*), tidak berada pada kepentingan masyarakat luas tetapi pada kepentingan perusahaan yang memberinya pendapatan (Nugroho, 2012: 7).

2. Intelektual pamer (*intellectual of spectacle*)

Tanda ini biasanya terjadi pada akademisi yang secara instan mendapat predikat ahli atau pakar karena tampil di acara-acara televisi. Akademisi dan komentar-komentarnya menjadi komoditas ton-tonan dari dunia *ci-luk-ba* (*peek a bow world*) buatan televisi. Heru Nugroho mencontohkan dirinya sendiri ketika menjadi staf di departemen di jakarta, sering diwawancara media nasional dan diberi predikat pakar, padahal sebenarnya dia belum banyak melakukan penelitian tentang itu. Jangan terburu naik pitam dulu, sebab tidak semua akademisi yang diwawancara di televisi demikian. Banyak juga ahli-ahli sungguhan yang dimintai pendapat tentang berbagai permasalahan sosial. Siaran televisi juga sesungguhnya sangat diperlukan untuk menularkan gagasan-gagasan para ahli kepada seluruh masyarakat (Nugroho, 2012: 8-9). Kembali pada predikat ahli/pakar yang diberikan secara instan, komentar-komentar akademisi yang demikian hanya memeriahkan gemerisik dunia yang dibuat televisi tanpa memberi sumbangsih yang berarti/berbobot bagi dunia pendidikan. Heru Nugroho menyebut dengan istilah fenomena klobotisme (seperti *klobot*, kertas pembungkus rokok yang diremas dan berbunyi *kemresek*, gemerisik). Akhirnya, kritik-kritik yang dilontarkan si akademisi lewat media hanya membawa keuntungan pribadi, misalnya diangkat menjadi menteri, wakil menteri, atau staf presiden. Akibat ini hanya memuaskan hasrat kuasa pragmatis (ekonomi-politik) si akademisi. Hasrat distansi dan diri otonom menjadi karakter si akademisi ketika membidik sasaran kritik menyebabkan kritik kehilangan daya empati/perspektifnya untuk sungguh menyelesaikan masalah sosial masyarakat (Nugroho, 2012: 9-10).

3. Kegiatan akademik yang involutif

Indikator banalitas intelektual yang ketiga adalah kegiatan akademik yang involutif. Maksudnya adalah seminar, diskusi topikal terus bergulir tapi tidak memberi makna yang cukup berarti dalam dunia akademis. Heru Nugroho menyebut dunia akademis hanya seperti suara pasar tradisional yang *gumrenggeng*, tidak jelas sungguh apa yang dibicarakan. Situasi yang ternyata terjadi adalah *juxtapose*, para akademisi melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian namun tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain (Nugroho, 2012: 10).

Dunia intelektual kampus justru ramai oleh politik kampus, bukan diskusi ilmiah. Pemilihan rektor atau dekan, misalnya, biasanya ada forum untuk memobilisasi dukungan bagi para calon yang lebih semarak dari diskusi ilmiah. Kesuksesan didapat bagi rektor atau dekan yang menjabat lebih dari satu periode. Jabatan yang prestisius

adalah rektor, dekan dan jajarannya, bukan kepala lembaga penelitian, pusat studi, atau pengelola jurnal ilmiah. Di sini, penulis juga Heru Nugroho bukan berarti tidak sepakat dengan jabatan struktural. Penghormatan diberikan kepada kolega-kolega yang bersusah payah rela memegang jabatan struktural. Disadari bahwa tanpa orang-orang yang rela memegang jabatan struktural, transfer ilmu pengetahuan tidak akan terjadi. Namun demikian, disarankan para profesor dan doktor tidak hanya disibukkan dengan urusan administratif dan birokratis tapi meluangkan waktunya untuk menulis, berefleksi secara kritis, dan mengajar. Ini untuk menampik anggapan bahwa tidak ada korelasi antara bertambahnya jumlah profesor dan doktor dengan bertambahnya diskursus ilmiah (Nugroho, 2012: 10-11).

Sindrom formalisme yang menyerang proses kreatif akademisi juga turut menjadi sebab kegiatan akademik yang involutif. Heru Nugroho menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum menulis buku atau jurnal ilmiah hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna mengejar jabatan guru besar. Kualitas jadi terabaikan, ISBN atau ISSN tertera menjadi lebih penting. Jurnal ilmiah juga banyak di antaranya yang dibuat untuk kepentingan pragmatis kenaikan pangkat dan jabatan (Nugroho, 2012: 12).

4. Kurangnya semangat kerja dan militansi ilmuwan

Militansi ilmuwan baik dalam penelitian teks maupun lapangan sangat diperlukan untuk perkembangan kualitas akademik dan intelektual. Heru Nugroho menggambarkan kurangnya militansi ilmuwan dalam contoh pengumpulan data etnografis di lapangan yang hanya memakan waktu satu hingga dua minggu tidak akan mendapatkan hasil yang memadai dan tingkat representative-nya rendah (Nugroho, 2012: 13). Sindrom formalisme dan tidak adanya sikap militan kaum akademisi menyebabkan sinisme ilmuwan-ilmuwan sosial, seperti Clifford Geertz dan Ignas Kleden karena ketergantungan teori sosial di Indonesia terhadap teori besar (*grand theory*) yang umumnya dari Barat. Aktivitas intelektual di Indonesia yang dihasilkan belum mencukupi untuk menerjemahkan realitas sosial. Produktivitas teoritik ilmuwan sosial masih rendah sehingga tidak heran jika ingin mengkritik Marx harus terlebih dahulu mendengarkan Karl Popper; atau menolak Max Weber atas nama Habermas; atau meninjau Comte dengan sarung tangan posmodernisme. Upaya untuk melepas ketergantungan ilmu sosial terhadap teori dari Barat memang sudah nampak pada pertengahan dekade 1980-an dan awal 1990-an dengan kemunculan gagasan pribumisasi (*indigenous*) ilmu sosial. Upaya ini belum sempat berkembang dan sudah mengalami tantangan berat dengan banyaknya

konsumsi teori dari Barat yang lain seperti post-modernisme, post-struktural (Nugroho, 2012: 14).

Situasi banalitas intelektual tidak lepas dari hubungan universitas dan negara (Nugroho, 2012: 15). Umar Kayam mengkritik bahwa perguruan tinggi di tanah air menjadi semacam “jawatan pemerintah”, yang bisa diperlakukan sebagai “dinas” pemerintahan atau semacam kantor kecamatan yang tugasnya melaksanakan instruksi pusat. Kritik ini memang dilancarkan di zaman Orde Baru, namun relevansinya masih terasa hingga kini. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menuntut penelitian dengan format yang distandarisasi dan administrasi keuangan yang rumit, namun substansi penelitian seringkali jadi terabaikan. Dosen menjadi sibuk dengan urusan-urusan administratif ini.

Heru Nugroho menyarankan untuk tetap optimis dalam memperbaiki dunia pendidikan Indonesia. Pelaku-pelaku pendidikan tidak keluar dari masalah tapi perlu berusaha menyelesaikan masalah, seperti kapal yang bocor, awak kapal tetap berusaha memperbaiki, bukan keluar dari kapal (Nugroho, 2012: 18).

C. Ilmu dan Filsafat Ilmu

Ide dasar dari tulisan ini ingin mencari akar banalitas intelektual di level filsafat ilmu, karena itu perlu dipaparkan secara sekilas tentang ilmu dan filsafat ilmu. Ilmu ialah kumpulan pengetahuan yang memiliki ciri tertentu, yaitu sistematis, punya lingkup yang jelas, memiliki metode dan obyektif. Kriteria-kriteria ini, khususnya kriteria obyektif, tentu senantiasa dipertanyakan. Kriteria ini, namun demikian, untuk sementara penulis gunakan untuk membedakan secara kasar antara ilmu dan opini biasa. Pengertian pengetahuan kemudian menjadi pertanyaan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil cerapan indra dan peruntutan logis yang dilakukan rasio manusia.

Peran filsafat dipaparkan terlebih dahulu sebelum menjawab pengertian filsafat. Filsafat, sebagaimana dinyatakan oleh Woodhouse, berusaha mengurai permasalahan yang berkaitan dengan kebenaran, makna dan keterkaitan logis (Woodhouse, 2000: 17). Katakanlah, ingin meneliti tentang pengetahuan, maka yang bisa dilakukan filsafat adalah mencari makna dari pengetahuan, sehingga pertanyaan yang muncul adalah: “apakah yang disebut pengetahuan?”. Mencari kebenaran dalam pengetahuan dapat memunculkan pertanyaan: “Pengetahuan seperti apakah yang benar, dapat diandalkan dan dapat dipercaya?”. Mencari keterkaitan logis, misalnya, disepakati pengetahuan bersumber dari pengalaman. Teori kebenaran yang secara logis bisa dipertanggungjawabkan, berdasar pendirian tersebut, adalah teori

korespondensi yang menyatakan suatu pernyataan benar sejauh sesuai dengan realitas.

Tema : membicarakan pengetahuan	
Mencari makna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah yang disebut pengetahuan?
Mencari kebenaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetahuan seperti apakah yang benar, dapat diandalkan dan dapat dipercaya? ▪ Apakah pengetahuan berasal dari pengalaman atau rasio, atau keduanya atau ada sumber lain?
Mencari keterkaitan logis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Misalnya, disepakati pengetahuan bersumber dari pengalaman. ▪ Teori kebenaran apa yang sesuai? ▪ Mengapa sesuai?

Selain ketiga peran ini, ada satu lagi peran yang dapat dilakukan oleh filsafat, yaitu mengeksplisitkan asumsi-asumsi dasar yang biasanya hanya diandaikan (Bakker, 2000: 12). Metode penalaran, misalnya, tanpa tahu dengan pasti definisi penalaran induksi maupun deduksi dalam keseharian pun kita telah melakukannya berkali-kali. Penalaran induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum sedang penalaran deduksi sebaliknya. Tugas filsafat pada konteks ini adalah mengeksplisitkan asumsi dasar dalam metode penalaran, sebab suatu pengalaman tak sadar akan semakin berfungsi efektif dalam pemahaman jika dieksplisitkan (Bakker dan Ahmad Charis, 1990: 54).

Peran-peran filsafat yang disebutkan di atas merupakan jenis peran deskriptif. Deskriptif ialah peran untuk menjelaskan sesuatu sebagai adanya sesuatu itu. Filsafat, di samping memiliki peran deskriptif, juga memiliki peran normatif, yaitu memberi orientasi arah yang seharusnya. Peran normatif membicarakan tentang nilai. Peran normatif filsafat pada konteks ilmu, misalnya, ialah memberi orientasi atau arah “bagaimanakah ilmu seharusnya?”, “apakah ilmu bebas nilai atau terkait erat dengan nilai-nilai lain?”, “apakah seharusnya ilmu tetap mengabdi pada kepentingan kesejahteraan manusia?”

Tema: membicarakan ilmu	
Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah ilmu itu? ▪ Apakah kriteria dasar disebut ilmu?
Normatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimanakah ilmu seharusnya? ▪ Apakah ilmu bebas nilai atau terkait erat dengan nilai-nilai lain? ▪ Apakah seharusnya ilmu tetap mengabdi pada kepentingan kesejahteraan manusia?

Melihat tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh filsafat, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan kajian yang kritis, komprehensif (menyeluruh), radikal, rasional dan memberi orientasi tentang suatu hal. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang berusaha dicari dalam filsafat yaitu pertanyaan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Digambarkan dalam bagan sebagai berikut (Suriasumantri, 1999: 4).

Ontologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah itu sesuatu? ▪ Apa yang ingin diketahui?
Epistemologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana cara mengetahuinya?
Aksiologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa nilai sesuatu bagi kita?

Filsafat ilmu, dengan demikian, merupakan kajian kritis, komprehensif (menyeluruh), radikal, rasional dan berusaha memberi orientasi pada ilmu. Filsafat ilmu, berdasar pengertian dan tiga pertanyaan mendasar di atas, membahas persoalan-persoalan sebagai berikut: definisi dan kriteria dasar ilmu, batas-batas ilmu pengetahuan (pembedaan sains dan pseudosains; ilmu alam dan ilmu sosial), sumber-sumber ilmu, metode-metode ilmiah, kriteria kebenaran ilmiah dan kaitan ilmu dengan nilai.

D. Akar Banalitas Intelektual

1. Semangat mementingkan kuantitas: romantisme kejayaan metode induktivis

Penyebab banalitas intelektual, yang pertama ialah dominasi pandangan kuantitatif dalam mengukur suatu kualitas. Pandangan ini diadopsi oleh negara dan tercermin dalam kebijakan-kebijakannya

untuk meningkatkan kualitas intelektual akademisi. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas intelektual ini tidak tepat, sebagai contoh kualitas intelektual diukur dari banyaknya tulisan dalam jurnal, akibatnya substansi dari tulisan tersebut justru sering kali diabaikan sehingga muncul jurnal-jurnal yang diterbitkan untuk kepentingan pragmatis kenaikan pangkat, sebagaimana dinyatakan oleh Heru Nugroho. Penulis tidak berarti menolak kehadiran jurnal. Jurnal ialah media yang sangat penting untuk mempublikasikan penelitian-penelitian ilmiah dari para akademisi sehingga dialog dalam ilmu terjadi.

Dominasi pandangan kuantitatif ini lahir dari kejayaan metode induktivis dalam ilmu. Penulis pada bagian ini berhutang pada tulisan Chalmers dalam “*What Is This Thing Called Science?*” tentang introduksi terhadap metode induksi. Ilmu pengetahuan dalam pandangan umum dikenal memiliki sifat-sifat sebagai berikut: kebenarannya telah dibuktikan, dapat ditarik dari fakta-fakta pengalaman melalui observasi dan eksperimen, objektif dan dapat dipercaya. Metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan sifat-sifat seperti pandangan di atas berawal dari metode yang digunakan Francis Bacon pada abad ke-17. Francis Bacon memperkenalkan metode induksi. Metode induksi berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya partikular, yang diperoleh dari pengamatan data-data empiris, untuk kemudian diolah secara metodis, menghasilkan kesimpulan yang sifatnya *general*.

Induktivisme naif berpandangan bahwa ilmu bertolak dari observasi dengan syarat pengamat memiliki organ indera yang normal dan sehat dan pengamat tidak mempunyai prasangka. Observasi akan menghasilkan serangkaian keterangan-keterangan observasi, misalnya: sejumlah orang menyerang pertokoan di tepi Jl. Jenderal Sudirman kemarin malam; bulan nampak pada posisi sekian di tanggal 15 Juli 2013 pukul 00:00 tengah malam. Keterangan-keterangan di atas termasuk dalam keterangan tunggal. Pengamat untuk menghasilkan keterangan tunggal menggunakan organ inderanya terhadap suatu tempat dan waktu tertentu. Selain keterangan tunggal, dikenal juga keterangan-keterangan universal yang mencakup semua kejadian tertentu di semua tempat dan waktu, misalnya: “planet-planet bergerak menurut garis *ellips* mengitari suryanya”. Hukum dan teori yang membentuk pengetahuan ilmiah mengemukakan keterangan-keterangan universal. Pertanyaan yang muncul kemudian: “bagaimana ungkapan yang sangat umum bisa dibenarkan berdasarkan bukti-bukti terbatas dari sejumlah keterangan observasi?” Induktivis menjawab

ada syarat agar sah melakukan generalisasi, yaitu terpenuhinya kondisi tertentu secara memuaskan. Kondisi tertentu tersebut disebutkan sebagai berikut: jumlah keterangan observasi yang membentuk dasar suatu generalisasi harus besar; observasi diulang-ulang pada variasi luas; dan keterangan observasi yang sudah diterima tidak boleh bertentangan dengan hukum universal yang menjadi kesimpulannya. Cara penjelasan di atas membawa serangkaian keterangan tunggal terbatas ke pembedaran keterangan universal atau disebut sebagai penalaran induktif. Hukum dan teori makin kuat jika fakta-fakta makin lengkap (Chalmers, 1983: 2-4).

Ilmu, di samping itu, juga mempunyai kemampuan menjelaskan dan meramalkan melalui penalaran deduksi. Penalaran deduksi merupakan penarikan kesimpulan dari premis-premis secara logis, misalnya:

- 1) Semua artikel tentang filsafat menjemukan.
- 2) Ini adalah sebuah artikel tentang filsafat.
- 3) Artikel ini menjemukan (kesimpulan).

Deduksi logika saja, namun demikian, tidak dapat berlaku sebagai sumber suatu keterangan yang benar tentang dunia. Ramalan dan penjelasan menurut tafsiran induktivis membutuhkan penalaran, baik induksi maupun deduksi (Chalmers, 1983:6-7). Berikut ini sebagai contohnya:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Air murni membeku pada 0 derajat Celcius.
2) Di dalam radiator mobil terdapat air murni.
3) Apabila suhu menurun sampai di bawah 0 derajat celcius, air di dalam radiator mobil saya akan membeku (kalau diberi cukup waktu). | Dicek lewat
observasi |
|--|----------------------------------|

Ilmu dengan metode induktivis yang demikian mempunyai sifat-sifat, yaitu memiliki daya menjelaskan dan meramalkan, keobjektifan, memiliki kesan realitas lebih unggul daripada bentuk-bentuk pengetahuan yang lain, objektif (tidak ada unsur perorangan), reliabilitas suatu ilmu merupakan kelanjutan dari observasi dan induksi. Metode induktivis ilmu, namun demikian, kemudian mendapat kritik, yaitu ketergantungan observasi dan eksperimen pada teori dan kesimpulan yang dihasilkan hanya bersifat kemungkinan (probabilitas), tidak pasti. Kritik ini akan dijelaskan pada alinea berikutnya.

Kuantitas memang memegang peranan penting dalam metode induktivis. Semakin banyak bukti yang didapatkan maka makin kuatlah teori. Segala kualitas kemudian mencoba diukur melalui kuantitas.

Munculnya statistika sebagai perkembangan dari matematika, semakin mendukung usaha untuk mengkuantifikasi kualitas. Kuantitas yang diwujudkan dalam numerik dianggap lebih memadai, lebih dapat dipercaya daripada uraian tentang kualitas.

Penelitian para akademisi, dari segi kuantitas, terus bertambah jumlahnya, namun penelitian-penelitian tersebut hanya menguatkan teori yang sudah mapan. Penelitian yang dibutuhkan sebenarnya justru penelitian yang mempunyai hipotesis yang berani dan bertentangan dengan teori yang menjadi arus-utama. Hipotesis penelitian tersebut apabila terbukti, maka akan memberi sumbangan yang sangat berarti bagi dunia akademis. Semangat yang digunakan ialah semangat falsifikasi. Falsifikasi, bagi Popper, merupakan peraturan utama dalam penemuan ilmiah. Peraturan utama ini mengatur prosedur ilmiah lain agar tidak melindungi pernyataan ilmiah dari falsifikasi, dengan kata lain, pernyataan ilmiah harus bisa difalsifikasi. sebagaimana diungkapkan oleh Karl Popper:

“... In establishing these rules (methodological rules) we may proceed systematically. First a supreme rule is laid down which serves as a kind of norm for deciding upon the remaining rules, and which is thus a rule of a higher type. It is the rule which says that the other rules of scientific procedure must be designed in such a way that they do not protect any statement in science against falsification” (Popper, 2005: 33).

Suatu teori dikatakan terfalsifikasi jika pernyataan dasar lain yang berkontradiksi dengan teori tersebut diterima. Teori dikatakan terfalsifikasi jika ditemukan *reproducible effect* (efek untuk kembali menghasilkan) yang menolak teori yang sedang berlaku. Hipotesis empiris tingkat rendah terfalsifikasi jika ditemukan bukti yang berlanjutan dengan hipotesis tersebut.

“We say that a theory is falsified only if we have accepted basic statements which contradict it ... We shall take it as falsified only if we discover a reproducible effect which refutes the theory. In other words, we only accept the falsification if a low-level empirical hypothesis which describes such an effect is proposed and corroborated. This kind of hypothesis may be called a falsifying hypothesis” (Popper, 2005: 66).

Teori ilmu pengetahuan dibuktikan tidak hanya dengan menambah bukti-bukti empiris baru tetapi dengan menunjukkan kesalahan suatu teori. Suatu teori ilmiah harus dapat difalsifikasi. Kebenaran

suatu teori tidak bersifat pasti tapi bersifat probabilitas karena ada kemungkinan bisa difalsifikasi (Wattimena, 2008: 185). Contoh pernyataan yang dapat difalsifikasi dan tidak dapat difalsifikasi (Chalmers, 1983: 41):

- 1) Semua planet bergerak dalam lintasan berbentuk *ellips*.
- 2) Semua titik di atas suatu lingkaran sama jaraknya dari titik pusatnya.
- 3) Keberuntungan mungkin terjadi dalam permainan judi.

Pernyataan pertama dapat difalsifikasi jika ditemukan planet yang bergerak tidak dalam lintasan berbentuk *ellips*. Sedang, pernyataan kedua tidak bisa difalsifikasi sebab memang demikian definisi lingkaran, jika titik-titik di atas lingkaran tidak sama jaraknya dari titik pusat maka tidak akan membentuk lingkaran. Pernyataan ketiga juga tidak bisa difalsifikasi karena baik keberuntungan terjadi maupun tidak, tidak bisa menggugurkan pernyataan tersebut (Chalmers, 1983: 41-42).

Popper dengan metode falsifikasi sebenarnya ingin mengkritik teori sosial Marxisme dan psikologi Freudian. Keduanya menafsirkan segala sesuatu melulu dari perspektif teorinya, kemudian mencari konfirmasi untuk mendukung teorinya sehingga tidak bisa difalsifikasi (Wattimena, 2008: 183).

Teori pengetahuan yang memadai ialah teori yang konsisten, koheren, serta dapat difalsifikasi. Ilmu pengetahuan bertujuan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang memiliki tingkat informasi tinggi tetapi tingkat kebenarannya masih terus dapat diperbarui (Wattimena, 2008: 185). Penelitian yang dibutuhkan, dengan demikian, ialah penelitian yang tidak hanya menambah data tentang kebenaran suatu teori tetapi juga yang dapat mefalsifikasi teori yang mapan.

2. Perubahan cara pandang sebagai jalan keluar

Teori, metode, dan pendekatan dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung dari paradigma yang berlaku saat itu. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu unsur dalam Paradigma Positivisme. Positivisme adalah paham yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang “positif” (terbukti secara faktual). Positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta. Positivisme merupakan ahli waris Empirisme yang sudah diradikalkan dalam pencerahan Prancis (Hardiman, 2011: 177). Sedikitnya ada empat unsur pokok yang terkandung dalam paradigma, yaitu teori-teori, cara baku menerapkan hukum-hukum fundamental pada berbagai situasi, instrumentasi, dan prinsip metafisis (bdk. Chalmers:

95-96). Paradigma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang. Paradigma dalam situasi *normal science* (ilmu biasa) membimbing segala aktivitas intelektual ilmuwan. Ilmuwan dalam situasi ilmu biasa ini tidak kritis terhadap paradigma yang dominan. Ilmuwan fokus untuk menjabarkan dan mempertanggungjawabkan teori yang berlaku. Gagasan ini merupakan salah satu bagian dari Revolusi Ilmiah-Thomas Kuhn. Dunia pendidikan di Indonesia, menurut hemat penulis, berada pada titik ini. Paradigma positivisme berkuasa untuk membimbing cara tafsir para akademisi, mahasiswa, universitas, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengenai kualitas intelektual.

Perubahan cara pandang yang mengutamakan kuantitas dapat dilakukan, pertama, dengan menyadari adanya kelainan dalam cara pandang tersebut. Situasi yang diderita dunia akademis universitas, seperti ditunjukkan Heru Nugroho, sebenarnya merupakan suatu kelainan (*anomalia*). Tidak adanya korelasi antara bertambahnya jumlah profesor dengan tingginya diskusi ilmiah yang diperhitungkan bisa dipandang sebagai suatu kelainan. Banyak jurnal ilmiah dan buku yang diterbitkan tidak sebanding dengan munculnya kemandirian teori-teori ilmiah dari ketergantungan terhadap *grand theory* yang umumnya dari Barat juga suatu kelainan.

Kelainan-kelainan ini mendorong usaha untuk mencari cara pandang baru yang lebih memadai. Penulis sama sekali tidak menolak cara pandang yang mengutamakan kuantitas. Kasus-kasus tertentu memang perlu menggunakan penilaian kuantitatif agar lebih efektif, misalnya nilai mahasiswa yang diwujudkan dalam angka atau huruf yang mewakili jumlah tertentu. Pendekatan kuantitatif, namun demikian, perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas. Persyaratan-persyaratan penelitian, evaluasi kinerja perlu melihat sisi kualitas tidak hanya dibebani peraturan administratif dan birokratis. Penerbitan buku dan jurnal ilmiah menjadi sungguh tulus sebagai publikasi penelitian, bukan memenuhi syarat administratif kenaikan pangkat. Dialog dalam ilmu bisa terjadi ketika buku dan jurnal sungguh menjadi media publikasi gagasan. Penelitian yang satu dan yang lain saling terkait. Usaha perubahan cara pandang ini bisa dilakukan “dari bawah ke atas” dan “dari atas ke bawah”. Cara pertama, “dari bawah ke atas”, para akademisi dari berbagai bidang ilmu dan universitas menyerukan perlunya negara melakukan perubahan cara pandang yang mengutamakan kuantitas dalam menilai kualitas intelektual. Seruan-seruan tersebut dapat diungkapkan dalam jurnal ilmiah, koran, atau buku. Seruan ini diiringi dengan semangat kerja dan militansi ilmuwan dalam menggali ilmu. Tanpa semangat kerja dan militansi, perubahan cara pandang hanya akan menghantarkan dunia pendidikan pada situasi

stagnan karena tidak ada perkembangan penelitian. Cara kedua, “dari atas ke bawah”, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu mengubah kebijakannya mengenai peraturan-peraturan kenaikan pangkat, evaluasi kinerja dosen, akreditasi fakultas dan persyaratan penelitian yang mengukur kualitas intelektual semata dari kuantitas, sehingga substansi dari karya-karya intelektual menjadi terabaikan. Penulis, se kali lagi, tidak menolak sama sekali penilaian kuantitas tetapi perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap kualitas. Penerapan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terhadap dunia akademis akan diikuti dengan perbaikan-perbaikan kerja dan kualitas karya dari para akademisi.

3. Tanda tanya untuk tujuan ilmu

Filsafat, selain memiliki peran deskriptif untuk menjelaskan, memiliki peran normatif untuk memberi orientasi pada ilmu. Peran normatif berbicara tentang nilai. Permasalahan nilai dalam ilmu ialah “apakah ilmu bebas nilai atau terkait dengan nilai?” Pandangan bahwa ilmu bebas nilai menginginkan agar ilmu bebas dari kepentingan ideologi, moral, subyektifitas peneliti, kultur, dan hal-hal lain di luar ilmu. Ilmu diharapkan menjadi otonom. Ilmu yang otonom, dengan demikian, akan mengemukakan kebenaran yang sejati karena tidak tunduk pada kepentingan-kepentingan di luar dirinya. Pandangan bahwa ilmu terkait dengan nilai, di sudut yang berseberangan, menyadari bahwa ilmu tidak mungkin lepas dari suatu konteks. Ilmu diabdiikan untuk kepentingan tertentu, misalnya ilmu untuk kesejahteraan manusia. Pandangan “ilmu terkait dengan nilai” menolak sterilisasi ilmu. Ilmu dicari bukan demi ilmu itu sendiri, tapi karena kegunaan di luar ilmu. Banalitas intelektual terjadi karena melupakan tujuan ilmu untuk kesejahteraan umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi peneliti (Dua, 2001: 149-154). Penulis, pada perdebatan mengenai nilai dan ilmu ini, berada posisi yang menekankan bahwa ilmu tidak bisa dipisahkan dari realitas dan nilai-nilai di luar ilmu walaupun penulis juga merasa bahwa konteks justifikasi (*context of justification*) tetap diperlukan untuk menjaga ilmu agar berpegang pada kebenaran.

Konteks penemuan (*context of discovery*) dan konteks justifikasi (*context of justification*) dikenal dalam diskursus ilmu dan nilai. Konteks penemuan menyatakan bahwa ilmu tidak berangkat dari kevakuman sehingga kemunculannya selalu terkait dengan kultur, kepentingan sosial, subyektifitas peneliti, ideologi pendana, moral dan lain-lain. Ilmu dicari karena memiliki kegunaan bagi manusia. Konteks justifikasi, di sisi lain, berusaha menilai ilmu berdasar kriteria-

kriteria ilmiah. Kriteria di luar kriteria ilmiah disingkirkan. Kebenaran ilmu tidak tergantung pada penguasa, ideologi, kultur dan hal-hal di luar ilmu. Kebenaran yang dinyatakan ilmuwan tidak tunduk pada otoritas apa pun seperti negara atau gereja (Dua, 2001: 154-158). Konteks justifikasi ini digunakan untuk menjaga agar kebenaran ilmu tidak dijajah oleh kepentingan lain, sebagai contoh, peneliti tidak bisa mengubah hasil penelitiannya tentang limbah industri yang mencemari lingkungan sekitar karena si peneliti bekerja untuk si pemilik pabrik. Peneliti tidak bisa mengubah data *polling* mengenai ketertarikan pada partai politik tertentu guna mengarahkan masyarakat agar memilih partai politik yang tampaknya banyak pemilihnya. Ada beberapa kasus seperti penyembuhan dengan *embryonic stem cell* yang dari konteks justifikasi memang benar karena sesuai dengan mekanisme prinsip-prinsip ilmiah, tetapi tidak bisa dibenarkan dari konteks penemuan karena walaupun menyelamatkan kehidupan tetapi mengorbankan kehidupan embrio.

E. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Banalitas intelektual adalah situasi yang ditandai oleh pendangkalan pemikiran yang tidak disadari, kemerosotan kualitas intelektual dan akademik. Negara, universitas, para dosen, dan mahasiswa disibukkan dengan standar sistem penilaian kualitas intelektual yang terlalu administratif dan birokratis tapi seringkali melupakan substansi.
2. Akar dari banalitas intelektual ini ialah cara pandang negara yang mementingkan kuantitas untuk mengukur kualitas intelektual. Negara menetapkan berbagai peraturan untuk pendidikan di Indonesia dan akhirnya para akademisi mau tidak mau menaati logika kuantitas ini. Pengutamaan semangat mementingkan kuantitas dapat dilihat sebagai romantisme kejayaan metode induksi. Akar banalitas intelektual yang kedua ialah pelupaan terhadap tujuan ilmu untuk mensejahterakan umat manusia, bukan hanya segolongan kecil manusia.
3. Dunia pendidikan di Indonesia yang tersusun dari jaring-jaring antara para akademisi, universitas, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai perpanjangan tangan Negara, perlu mencari cara pandang baru yang nantinya akan membimbing pendekatan dalam mengukur kualitas intelektual. Perubahan cara pandang ini berpengaruh pada usaha yang dilakukan oleh Negara untuk meningkat-

- kan kualitas intelektual akademisi dan usaha si ilmuwan dalam menggali ilmu. Peneliti juga tidak hanya menambah jumlah penelitian yang menguatkan teori yang berlaku tapi perlu mencari yang bertentangan dengan teori tersebut.
4. Pendekatan kuantitatif dalam menilai kualitas intelektual perlu diimbangi pendekatan kualitatif agar tujuan ilmu untuk kesejahteraan umat manusia dapat terwujud, tentu tanpa meninggalkan penjagaan terhadap kebenaran ilmu sesuai kriteria ilmiah.
- F. Daftar Pustaka**
- Bakker, Anton, 2000, *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, Charis, Ahmad, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta.
- Chalmers, A.F, 1983, *What Is This Thing Called Science? (Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?)*, (terj: redaksi Hasta Mitra, ed: Joe-soef Isak), Hasta Mitra, Jakarta.
- Dua, Michael; Keraf, A. Sonny, 2001, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*,Kanisius, Yogyakarta.
- Hardiman, Budi, 2011, *Pemikiran-pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli Sampai Nietzsche)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Haryatmoko, 2010, *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasinya*, PT Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, Heru, 2012, *Negara, Universitas dan Banalitas Intelektual: Sebuah Refleksi Kritis Dari Dalam*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Popper, Karl, 2005, *The Logic of Scientific Discovery*, Routledge Classics, Taylor & Francis e-Library, New York.
- Suriasumantri, Jujun S., 1999, *Ilmu Dari Perspektif*; Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Wattimena, Reza A.A., 2008, *Filsafat dan Sains: Sebuah Pengantar*, PT. Grasindo, Jakarta.
- _____, 2011, *Hannah Arendt dan Banalitas Kejahatan*, Rumahfilsafat.com.
- Woodhouse, Mark B., 2000, *Berfilsafat Sebuah Langkah Awal*, Kanisius, Yogyakarta.